

Ringkasan Eksekutif

Penelitian Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bangka Selatan bertujuan untuk menyusun SPKD yang berdimensi pada pengembangan ekonomi wilayah untuk menjadi dasar integrasi program sektoral dan spasial di Kabupaten Bangka Selatan. SPKD juga bertujuan untuk mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan indikasi program pengentasan kemiskinan, tahapan waktu yang dijabarkan dalam komponen kegiatan serta konsep, arahan kebijakan, strategi dalam pengentasan kemiskinan dalam keterkaitan dan konteks pembangunan wilayah dengan memperhatikan faktor keberadaan sumber daya ekonomi, pola dampak kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup dokumen penelitian SPKD meliputi empat hal, yaitu diagnosis kemiskinan, strategi dan rencana aksi yang memuat strategi, prioritas kebijakan dan langkah kebijakan termasuk sasaran dan indikator kinerja, tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan, dan pembagian peran yang jelas antar pelaku baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional.

Hasil penelitian ini menekankan pada dua hal penting. Pertama, sisi prioritas intervensi meliputi tiga bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Prioritas intervensi bidang pendidikan meliputi tiga indikator yakni APK SD/MI, APK SMP/MTs dan APM SD/MI. Namun demikian, analisis relevansi dengan perkembangan provinsi merekomendasikan agar APK SLTP/MTs harus segera diintervensi mengingat perkembangannya tidak relevan dengan provinsi. Prioritas intervensi bidang infrastruktur dasar adalah proporsi rumah tangga dengan akses listrik. Indikator ini berada pada posisi relatif buruk, perkembangan waktunya juga memburuk serta tingkat keefektifan yang juga semakin memburuk.

Kedua, kaji ulang kebijakan. Kaji ulang dilakukan terutama pada pengelolaan ekonomi makro yang mencakup kebijakan daerah masalah fiskal daerah, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, kependudukan, dan perwujudan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

Mekanisme kebijakan aksi yang dirumuskan penelitian ini adalah pertama, kewajiban Pemda Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan sumberdaya secara maksimal, merealisasikan pemenuhan hak dasar tersebut secara bertahap dan progresif, serta memastikan semua tindakan yang diambil harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kedua, pelembagaan pelaksanaan rencana aksi. Pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tim TKPK tingkat kabupaten/kota ini merupakan forum lintas pelaku - forum nasional, forum regional dan/atau forum nasional-regional yang terdiri dari

semua unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, kelompok swadaya masyarakat, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya, untuk menggalang kontribusi gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju, bagi peningkatan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

TIM PENELITI

Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2014

Ketua Peneliti : Suhardi, SE.,M.Sc.Akt
Anggota Peneliti : Iskandar Zulkarnain, S.IP.,M.A.
Suhaidar, SE.,M.Si

Kerja Sama

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bangka Belitung

Dengan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan